

TEMUAN HASIL AUDIT KINERJA APIP
PERIODE RMP : 01-01-2023 S/D JENIS : PKPT

Kode	Kelompok / Sub / Jenis TP	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	220	89,07	1.064.312.359,00
1.01	<i>Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah</i>	71	28,74	761.031.653,00
1.01.01	Belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif	8	3,24	208.121.600,00
1.01.02	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	0	0	0,00
1.01.03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	0,4	88.680.000,00
1.01.04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	14	5,67	36.252.418,00
1.01.05	Pemahalan harga (Mark up)	1	0,4	5.360.000,00
1.01.06	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	0,4	15.000.000,00
1.01.07	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	7	2,83	86.195.750,00
1.01.08	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	0	0	0,00
1.01.09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	39	15,79	321.421.885,00
1.01.10	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	0	0	0,00
1.01.11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	0	0	0,00
1.01.12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah	0	0	0,00
1.01.13	Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	0	0	0,00
1.01.14	Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan	0	0	0,00
1.01.15	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan	0	0	0,00
1.01.16	Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan	0	0	0,00
1.01.17	Penentuan HPP (harga pokok pembelian) terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari	0	0	0,00
1.01.18	Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak da	0	0	0,00
1.01.19	Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif	0	0	0,00
1.02	<i>Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara</i>	0	0	0,00
1.02.01	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagai	0	0	0,00
1.02.02	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama mas	0	0	0,00
1.02.03	Aset dikuasai pihak lain	0	0	0,00
1.02.04	Pembelian aset yang berstatus sengketa	0	0	0,00
1.02.05	Aset tidak diketahui keberadaannya	0	0	0,00
1.02.06	Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilita	0	0	0,00
1.02.07	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	0	0	0,00
1.02.08	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	0	0	0,00
1.02.09	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	0	0	0,00
1.02.10	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	0	0	0,00
1.03	<i>Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah</i>	29	11,74	303.280.706,00
1.03.01	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima	27	10,93	298.280.706,00
1.03.02	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	0	0	0,00
1.03.03	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah	0	0	0,00



Kode	Kelompok / Sub / Jenis TP	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
1.03.04	Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	2	0,81	5.000.000,00
1.03.05	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	0	0	0,00
1.03.06	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	0	0	0,00
1.03.07	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	0	0	0,00
1.04	<i>Administrasi</i>	120	48,58	0,00
1.04.01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	51	20,65	0,00
1.04.02	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	0	0	0,00
1.04.03	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	0	0	0,00
1.04.04	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	0	0	0,00
1.04.05	Pelaksanaan lelang secara performa	0	0	0,00
1.04.06	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik	39	15,79	0,00
1.04.07	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertam	30	12,15	0,00
1.04.08	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	0	0	0,00
1.04.09	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	0	0	0,00
1.04.10	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/daerah melebihi batas wak	0	0	0,00
1.04.11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	0	0	0,00
1.04.12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	0	0	0,00
1.04.13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	0	0	0,00
1.04.14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	0	0	0,00
1.04.15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	0	0	0,00
1.04.16	Pelampauan pagu anggaran	0	0	0,00
1.05	<i>Indikasi tindak pidana</i>	0	0	0,00
1.05.01	Indikasi tindak pidana korupsi	0	0	0,00
1.05.02	Indikasi tindak pidana perbankan	0	0	0,00
1.05.03	Indikasi tindak pidana perpajakan	0	0	0,00
1.05.04	Indikasi tindak pidana kepabeanan	0	0	0,00
1.05.05	Indikasi tindak pidana kehutanan	0	0	0,00
1.05.06	Indikasi tindak pidana pasar modal	0	0	0,00
1.05.07	Indikasi tindak pidana khusus lainnya	0	0	0,00
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	24	9,72	0,00
2.01	<i>Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan</i>	6	2,43	0,00
2.01.01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	5	2,02	0,00
2.01.02	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	0	0	0,00
2.01.03	Entitas terlambat menyampaikan laporan	0	0	0,00
2.01.04	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1	0,4	0,00
2.01.05	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	0	0	0,00
2.02	<i>Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja</i>	11	4,45	0,00
2.02.01	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	2,02	0,00
2.02.02	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan negara/daerah/perusahaan	0	0	0,00
2.02.03	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern orga	4	1,62	0,00
2.02.04	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	0,4	0,00
2.02.05	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerim	0	0	0,00



Kode	Kelompok / Sub / Jenis TP	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
2.02.06	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya /belanj	0	0	0,00
2.02.07	Kelemahan pengelolaan fisik aset	1	0,4	0,00
2.03	<i>Kelemahan struktur pengendalian intern</i>	7	2,83	0,00
2.03.01	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	4	1,62	0,00
2.03.02	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2	0,81	0,00
2.03.03	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	0	0	0,00
2.03.04	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	0,4	0,00
2.03.05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	0	0	0,00
3	Temuan 3E	3	1,21	0,00
3.01	<i>Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan</i>	2	0,81	0,00
3.01.01	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	0	0	0,00
3.01.02	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	2	0,81	0,00
3.01.03	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	0	0	0,00
3.02	<i>Ketidakefisienan</i>	0	0	0,00
3.02.01	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	0	0	0,00
3.02.02	Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya	0	0	0,00
3.03	<i>Ketidakefektifan</i>	1	0,4	0,00
3.03.01	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	0	0	0,00
3.03.02	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	0	0	0,00
3.03.03	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	0	0	0,00
3.03.04	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	0	0	0,00
3.03.05	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	0	0	0,00
3.03.06	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	0	0	0,00
3.03.07	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerima	1	0,4	0,00
3.03.08	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	0	0	0,00
	TOTAL	247	100	1.064.312.359,00

